

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk di Kabupaten Lombok Barat, Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama, maka diperlukan jaminan terhadap pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

* + 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5871);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
9. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
13. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
15. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
17. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
18. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
20. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
21. Tenaga kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja dengan disabilitas namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
22. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Komisi Disabilitas Daerah adalah lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
26. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

1. penghormatan terhadap martabat;
2. otonomi individu;
3. kemanusiaan;
4. tanpa diskriminasi;
5. partisipasi penuh;
6. keragaman manusia dan kemanusiaan;
7. kesamaan kesempatan;
8. kesetaraan;
9. aksesibilitas; dan
10. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

1. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
2. mewujudkan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara optimal, penuh dan setara dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
3. meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup Penyandang Disabilitas;
4. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
5. memastikan pelaksanaan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya; dan
6. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran serta pelaku usaha, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam pelindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

1. Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
   1. penyandang disabilitas fisik;
   2. penyandang disabilitas intelektual;
   3. penyandang disabilitas mental; dan/atau
   4. penyandang Disabilitas sensorik.
2. Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
3. Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *downsyndrom*.
4. Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
   1. psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
   2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
5. Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 5

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

1. Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
2. Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. hak hidup;
   2. hak bebas daristigma;
   3. hak privasi;
   4. hak keadilan dan perlindungan hukum;
   5. hak pendidikan;
   6. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
   7. hak kesehatan;
   8. hak politik;
   9. hak keagamaan;
   10. hak keolahragaan;
   11. hak kebudayaan dan pariwisata;
   12. hak kesejahteraan sosial;
   13. hak disabilitas;
   14. hak pelayanan publik;
   15. hak pelindungan dari bencana;
   16. hak habilitasi dan rehabilitasi;
   17. hak konsesi;
   18. hak pendataan;
   19. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
   20. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
   21. hak kewarganegaraan; dan
   22. hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
3. Jenis hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), perempuan penyandang disabilitas memiliki hak meliputi:

* 1. hak atas kesehatan reproduksi;
  2. hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  3. hak mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
  4. hak untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 8

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), anak penyandang disabilitas memiliki hak meliputi:

1. hak mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. hak Pemenuhan kebutuhan khusus;
6. hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
7. hak mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV

PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK

PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

1. Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
2. Perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program atau kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

1. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati menetapkan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
2. Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada:
   1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
   2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
3. Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 11

1. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
2. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
3. Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
4. Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
5. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
6. Jenis keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
7. keterampilan menulis dan membaca huruf *braille* untuk Penyandang Disabilitas netra;
8. keterampilan orientasi dan mobilitas;
9. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
10. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
11. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 12

1. Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
2. Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
4. Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
5. Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 13

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan:
   1. sarana dan prasarana belajar mengajar;
   2. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat atau *braille,* dan memiliki pengetahuan tentang cara perlakuan terhadap peserta didik dengan disabilitas; dan
   3. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
2. Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.

Pasal 14

1. Untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel serta akomodasi yang layak, penyelenggara pendidikan wajib melibatkan orang tua dari siswa Penyandang Disabilitas dalam Komite Sekolah.
2. Penyelenggara pendidikan dilarang untuk mempergunakan dana pendidikan inklusif selain untuk pendidikan siswa dengan disabilitas.

Pasal 15

1. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
2. Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
   1. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
   2. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
   3. mengembangkan program kompen satorik;
   4. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
   5. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
   6. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
   7. menyediakan layanan konsultasi; dan
   8. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

1. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
2. Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Penyelenggara yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
4. teguran terulis;
5. penghentian kegiatan pendidikan;
6. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
7. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
8. Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Buapati.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas, keluarganya, dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pekerjaan dan Kewirausahaan

Pasal 18

1. Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
3. Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam system jaminan nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 20

1. Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
2. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3. Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

1. Rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:
3. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
4. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
5. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
6. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.
7. Pemberi Kerja penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:
8. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
9. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugaskerja;
10. menyediakan waktu istirahat;
11. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
12. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
13. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.
14. Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 22

1. Pemberi Kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
2. Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
3. Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
   1. teguran tertulis;
   2. penghentian kegiatan operasional;
   3. pembekuan izin usaha; dan/atau
   4. pencabutan izin usaha.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 24

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:
   1. melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitasan;
   2. menyediakan aksesibilitas informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja Penyandang Disabilitas; dan
   3. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

a. ketersediaan informasi lapangan pekerjaan;

b. sistem pengupahan;

c. aksesibilitas tempat kerja;

d. pelatihan bagi calon tenaga kerja disabilitas;

e. jumlah dan formasi yang dapat diisi Penyandang Disabilitas usia kerja; dan

f. kompetensi yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas usia kerja.

1. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

1. Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
2. Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. merencanakan Pelindungan dan Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
   2. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
   3. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
   4. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
   5. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

1. Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   1. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
   2. bantuan sarana dan prasarana untuk usaha mandiri atau kelompok usaha yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
   3. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri untuk memperoleh akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
   4. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan
   5. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
3. Tata cara pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kesehatan

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi pasien Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah Daerah dan swasta wajib menyediakan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Setiap pemberi layanan kesehatan dilarang menolak pasien Penyandang Disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan.

Pasal 28

1. Pemerintah Daerah wajib memberikan upaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
2. Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip kemudahan, keselamatan, dan kepuasan pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
4. promotif;
5. preventif;
6. kuratif; dan
7. rehabilitatif.

Pasal 29

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a meliputi:

1. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
2. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
3. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.

Pasal 30

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b berupa upaya pencegahan penyakit yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup dan perilaku yang sehat dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 31

1. Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
2. Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, pelayanan di sarana kesehatan dasar dan pelayanan di sarana kesehatan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
3. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar pelayanan minimal, dan dilakukan dengan:
   1. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
   2. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
   3. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial; dan
   4. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 32

1. Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d merupakan suatu kegiatan rehabilitasi medik untuk mengembalikan fungsi organ tubuh secara optimal.
2. Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik.
3. Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan:
   1. dokter;
   2. psikolog;
   3. fisioterapi:
   4. okupasiterapi;
   5. terapiwicara;
   6. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
   7. sosial medik; dan
   8. pelayanan medik lainnya.
4. Dukungan pembiayaan untuk pelayanan atas tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
2. Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
3. Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin**.**
4. Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

1. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat beserta jaringannya dan klinik pratama;
4. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta; dan
5. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta.

Bagian Kelima

Politik

Pasal 35

1. Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi aktif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
2. Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 36

1. Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dalam negeri.

Pasal 37

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

1. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
2. mendapatkan informasi, teknis dan atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 38

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik dan pemerintahan.

Pasal 39

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

1. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
2. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
3. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
4. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
5. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
6. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
7. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
8. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
9. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Bagian Keenam

Keolahragaan

Pasal 40

1. Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas meliputi:
   1. Keolahragaan pendidikan;
   2. keolahragaan rekreasi; dan
   3. keolahragaan prestasi.
2. Pengembangan sistem keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 41

1. Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pengenalan olahraga, penataran atau pelatihan olahraga, dan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan serta turnamen pada tingkat Kabupaten.
3. Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi olahraga Penyandang Disabilitas.
4. Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sentra pembinaan olahraga khusus Penyandang Disabilitas.

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi atau perkumpulan olahraga penyandang disabilitas menyelenggarakan pekan olahraga penyandang disabilitas secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan antar Kabupaten/Kota dan/atau organisasi/ perkumpulan olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 43

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 44

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.

(2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan

b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.

(2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan senibudaya;

b. pengembangan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan

c. pemberian penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 47

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 48

1. Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan

Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial;
2. jaminan sosial;
3. pemberdayaan sosial; dan
4. perlindungan sosial.
5. Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disasbilitas untuk mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 50

1. Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
   1. motivasi dan diagnosis psikososial;
   2. perawatan dan pengasuhan;
   3. bimbingan mental spiritual;
   4. bimbingan fisik;
   5. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
   6. pelayanan aksesibilitas;
   7. bantuan dan asisten sisosial;
   8. bimbingan resosialisasi;
   9. bimbingan dan pembinaan kewirausahaan;
   10. bimbingan lanjut; dan/atau
   11. rujukan.

(3) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

(4) Sasaran Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ditujukan kepada:

a. Penyandang Disabilitas;

b. keluarga/wali/pendamping; dan

c. masyarakat.

(5) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas dilakukan di:

1. dalam Lembaga; dan/atau
2. luar Lembaga.

Pasal 51

1. Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial di dalam Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf a merupakan proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam Lembaga rehabilitasi dengan menyediakan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal/asrama dalam kurun waktu tertentu secara layak.
2. Jenis pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemberian tempat tinggal yang layak di Lembaga;

b. jaminan hidup berupa makan, pakaian, alat bantu, dan pemeliharaan kesehatan;

c. bimbingan fisik, mental, sosial, keterampilan, agama;

d. pengisian waktu luang dan rekreasi;

e. pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung;

f. perawatan dan pengasuhan;

g. pemenuhan kebutuhan sehari-hari;

h. pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas;

i. pendampingan dan advokasi; dan

j. bantuan dan asistensi sosial.

1. Pemberian pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan ragam disabilitasnya.

Pasal 52

(1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b merupakan proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas diluar lembaga yang dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Jenis pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. bantuan sosial berupa permakanan, pakaian, alat bantu, dan pemeliharaan kesehatan;

b. bimbingan keterampilan kegiatan sehari-hari;

c. bimbingan mental;

d. bimbingan sosial;

e. bimbingan keterampilan kerja/usaha;

f. bimbingan agama;

g. pengisian waktu luang dan rekreasi;

h. pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung;

i. perawatan dan pengasuhan;

j. perawatan harian;

k. perawatan dalam keluarga;

l. konseling;

m.penyediaan alat transportasi;

n. pendampingan dan advokasi;

o. penyadaran masyarakat; dan/atau

p. pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas.

(3) Pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

a. penerima pelayanan datang ke Lembaga untuk mendapatkan layanan tertentu sesuai dengan kebutuhan dengan pendampingan oleh Lembaga; dan/atau

b. petugas menjangkau ke lokasi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 53

(1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Lembaga, dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.

(2) Dalam melakukan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:

a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;

b. Relawan Sosial; dan/atau

c. profesi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 54

(1) Pelaksana Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 bertugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat yang menjadi sasaran yang berada dalam wilayah jangkauan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

b. layanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan gender, peningkatan akses terhadap Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial, penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dan penguatan kelembagaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

c. melakukan kontrak Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial yang mencakup komitmen penerima pelayanan dan keluarga untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan Lembaga;

d. melaksanakan tugas profesional dalam mendampingi sasaran Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, yang terdiri atas asesmen, pembahasan kasus, penanganan kasus, pencatatan, motivasi, dan membangun jaringan kerja;

e. melakukan advokasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas dalam mengakses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial yang dibutuhkan;

f. membuat laporan penanganan kasus; dan

g. membuat laporan pelaksanaan pendampingan setiap 3 (tiga) bulan dan akhir tahun kontrak kerja.

Pasal 55

(1) Lembaga yang melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas:

a. unit pelaksana teknis daerah yang berada pada perangkat daerah; dan/atau

b. lembaga Kesejahteraan Sosial.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

(3) Penyelenggaraan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyiapkan data sasaran Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara lengkap dengan keterangan nama, alamat, ragam disabilitas, usia, jenis kelamin, riwayat disabilitas, dan kebutuhan aksesibilitas;

b. melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan penanganan masalah;

c. melakukan penjangkauan, pemberian bimbingan, bantuan, atau pendampingan sosial terhadap Penyandang Disabilitas yang membutuhkan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dengan melibatkan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial, dan profesi lain sesuai dengan kebutuhan;

d. memfasilitasi penyelenggaraan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan keluarga penerima pelayanan;

e. menangani kasus dengan melibatkan tenaga profesional yang terkait;

f. melakukan rujukan dan bimbingan lanjut sesuai dengan kebutuhan;

g. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

h. melakukan advokasi sosial kepada Lembaga mitra penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

i. membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak; dan

j. membuat laporan pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara berkala.

Pasal 56

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah milik pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani Penyandang Disabilitas yang berada dibawah Dinas.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:

a. visi, misi, dan program rehabilitasi;

b. struktur organisasi;

c. sumber daya manusia;

d. sarana dan prasarana; dan

e. anggaran yang pertanggungjawaban.

Pasal 57

(1) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

(2) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki status:

a. berbadan hukum; atau

b. belum berbadan hukum.

(3) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Kementerian Sosial, instansi sosial Daerah Provinsi, atau instansi sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah kewenangannya.

Paragraf 3

Jaminan Sosial

Pasal 58

1. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.

(3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Paragraf 4

Pemberdayaan Sosial

Pasal 59

1. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
   1. peningkatan kemauan dan kemampuan;
   2. penggalian potensi dan sumberdaya;
   3. penggalian nilaidasar;
   4. pemberian akses; dan/atau
   5. pemberian bantuan usaha.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

* 1. diagnosis dan pemberian motivasi;
  2. pelatihan dan pendampingan;
  3. pemberian stimulan;
  4. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  5. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  6. bimbingan lanjut.

Paragraf 5

Perlindungan Sosial

Pasal 60

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

1. bantuan sosial;
2. advokasi sosial; dan/atau
3. bantuan hukum.

Pasal 61

(1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diselenggarakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas.

(2) Pemerintah Daerah dapat meembentuk unit pelaksana tehnis daerah yang menangani khusus Penyandang Disabilitas yang berada dibawah tanggung jawab kepala Dinas.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 63

1. Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.
2. Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 64

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; dan

b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

(4) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Biro Hukum dan dapat dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan;

b. pengenalan tindak pidana; dan

c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Publik

Pasal 66

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, instansi pemerintah/penyelenggara negara, swasta, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
3. Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 67

1. Pemerintah Daerah atau instansi pemerintah lainnya, swasta, lembaga independen, dan badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) memberikan pelayanan melalui perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas.
2. Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada Penyandang Disabilitas.
3. Tempat fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memasang pengumuman prioritas pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 68

1. Dalam hal penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tidak memberikan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas atau mempersulit proses pemberian pelayanan, Penyandang Disabilitas atau keluarganya atau masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut dapat melaporkan kepada komisi pelayanan publik atau Ombudsman.
2. Komisi pelayanan publik atau Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

(2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Pelayanan Publik oleh Perangkat Daerah kepada penyandang disabilitas.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Aksesibilitas

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

1. Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
2. Aksesibiltas terhadap fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bangunan gedung;

b. jalan;

c. permukiman; dan

d. pertamanan dan permakaman.

Pasal 71

Upaya perwujudan aksesibilitas terhadap fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Bangunan Gedung

Pasal 72

1. Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a memiliki fungsi meliputi:
   1. fungsi hunian;
   2. fungsi keagamaan;
   3. fungsi usaha;
   4. fungsi sosial dan budaya;
   5. fungsi olahraga; dan
   6. fungsi khusus.
2. Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aksesibilitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan menyediakan paling sedikit:
   1. akses ke, dari dan di dalam bangunan gedung;
   2. pintu, tangga, dan/atau lift untuk bangunan gedung bertingkat;
   3. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
   4. toilet;
   5. peringatan darurat; dan
   6. tanda-tanda khusus.

Pasal 73

1. Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
2. Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
3. Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
4. Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
5. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 74

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Jalan

Pasal 75

1. Jalan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b dilengkapi fasilitas untuk pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.

(2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan sepeda.

(3) Fasilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.

(4) Fasilitas untuk pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan paling sedikit:

a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas;

b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas;

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas; dan/atau

d. alat penerangan jalan.

(5) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

b. trotoar;

c. jembatan penyeberangan; dan/atau

d. terowongan penyeberangan.

Pasal 76

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas yang mudah diakses pada jalan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
2. Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 4

Permukiman

Pasal 77

1. Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
2. Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
3. Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pertamanan dan Permakaman

Pasal 78

1. Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
2. Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas

Pelindungan dari Bencana

Pasal 79

1. Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin pelindungan dan penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas dan kelompok rentan pada tahap:

a. prabencana;

b. saat tanggap darurat; dan

c. pasca bencana.

1. Pelindungan dan penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
2. Pelindungan dan penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas dan kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akomodasi yang layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

1. Upaya pelindungan dan penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas dan kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan oleh instansi atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pola pendampingan atau fasilitasi.
2. Pendampingan atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Daerah dalam penanggulangan bencana di bidang teknis, administratif, peralatan, dan pendanaan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas

Pendataan

Pasal 82

Penyandang Disabilitas memiliki hak pendataan meliputi:

1. hak didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. hak mendapatkan dokumen kependudukan; dan
3. hak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 83

1. Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
3. Data tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
   1. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
   2. membantu perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 84

1. Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
2. Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui camat.
3. Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
4. Dalam hal diperlukan, bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 85

1. Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
2. Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Keempat Belas

Komunikasi dan Informasi

Pasal 86

Penyandang Disabilitas memilik hak berkomunikasi dan memperoleh informasi meliputi:

1. hak mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
2. hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Pasal 87

1. Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
2. Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf *braille*, audio, visual, dan/atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.
3. Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 88

1. Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi bagi Penyandang Disabilitas.
2. Akses atas informasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 89

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat difahami sesuai dengan ragam disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepa waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kelima Belas

Perempuan dan Anak

Pasal 90

1. Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas meliputi Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.
2. Perangkat Daerah terkait yang membidangi perempuan dan anak bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pelindungan khusus perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 91

Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 92

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat bagi perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 93

Pemerintah Daerah wajib menjamin anak Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka sesuai dengan usia, kematangan, dan ragam disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.

Bagian Keenam Belas

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,

Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 94

Penyandang Disabilitas memiliki hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi meliputi:

a. hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan

b. hak mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 95

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

Pasal 96

Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 97

1. Untuk menjamin terlaksananya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efektif, pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Kabupaten.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
3. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
4. Dinas dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
   1. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
   2. menjamin dan memastikan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah berjalan dengan efektif;
   3. mewujudkan tersedianya anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang memadai; dan
   4. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 98

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta secara aktif dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat guna mewujudkan pelindungan, kemandirian, dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.
3. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
   1. perseorangan;
   2. keluarga;
   3. organisasi keagamaan;
   4. organisasi kemasyarakatan di bidang sosial atau Penyandang Disabilitas;
   5. lembaga swadaya masyarakat;
   6. organisasi profesi;
   7. pelaku usaha;
   8. lembaga kesejahteraan sosial baik dalam negeri maupun luar negeri; dan/atau
   9. lembaga pendidikan.
4. Peranserta masyarakat dan lembaga luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h berpedoman pada kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peran serta masyarakat yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat bersumber atau dalam bentuk program yang bersifat tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 99

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan dalam bentuk:

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan produk hukum daerah dan kebijaksanaan di bidang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
2. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
3. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
4. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
5. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
6. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
7. pengadaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
8. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas; dan
9. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 100

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:

a. orang perseorangan yang berjasa dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

b. badan hukum atau usaha, dan lembaga negara di Daerahyang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan

c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

1. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai tanda jasa kepada para pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. piagam atau sertifikat;

b. lencana atau medali kepedulian;

c. tropy atau miniatur kemanusiaan;

d. insentif.

1. Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 101

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:

a. penetapan produk hukum daerah dan kebijaksanaan;

b. penyuluhan;

c. bimbingan;

d. pemberian bantuan; dan

e. perizinan.

1. Pembinaan melalui penetapan produk hukum daerah dan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun dan menetapkan produk hukum daerah dan kebijaksanaan upaya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.
2. Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
   1. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
   2. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
   3. meningkatkan peran Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional dan Daerah.
3. Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk:
4. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
5. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.
6. Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk:
7. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya;
8. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.
9. Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan:

a. penetapan produk hukum daerah yang mempersyaratkan pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam pemberian izin untuk mendirikan bangunan atau izin lainnya; dan

b. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 102

1. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Bupati.
2. Penbinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja terkait.
3. Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KOMISI DISABILITAS DAERAH

Pasal 104

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, dibentuk Komisi Disabilitas Daerah.

(2) Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(3) Keanggotaan Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Perangkat Daerah terkait;

b. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;

c. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;

d. perwakilan badan hukum atau badan usaha;

e. perwakilan akademisi;

f. tokoh masyarakat; dan

g. perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 105

(1) Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Disabilitas Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
2. memberikan masukan, pertimbangan, dan/atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
3. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait; dan
4. advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(3) Fungsi advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menerima pengaduan dari Penyandang Disabilitas atau masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan

b. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas atau masyarakat;

c. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya; dan

d. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang terkait sebagai tindak lanjut upaya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat atau Penyandang Disabilitas.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Komisi Disabilitas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 107

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
2. Perangkat Daerah terkait yang mengangani pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, wajib mengalokasikan pembiayaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.
3. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
   1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
4. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 108

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

a. hak Pendidikan; hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; hak kesehatan; hak politik; hak keagamaan; hak keolahragaan; hak kebudayaan dan pariwisata; hak kesejahteraan sosial; hak aksesibilitas; hak pelayanan publik; hak pelindungan dari bencana; hak habilitasi dan rehabilitasi; hak pendataan; hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi; hak kewarganegaraan; dan hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf v; dan

b. hak keadilan dan perlindungan hukum sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 109

1. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang sosial atau Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini;

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan;

c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenan dengan adanya tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;

g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

h. melakukan penghentian penyidikan; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

1. Setiap orang/badan layanan jasa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 108 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Penyediaan aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung

pada tanggal Mei 2024

BUPATI LOMBOK BARAT,

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga Negara Indonesia secara konstitusional mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan tanpa kecuali, termasuk para Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara dan masyarakat Indonesia, untuk hidup dan berkembang secara adil danbermartabat, serta meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup Penyandang Disabilitas.

Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia, sebagian besar Penyandang Disabilitas termasuk di Daerah Kabupaten Lombok Barat masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin, serta belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama, yang disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak Penyandang Disabilitas. Berbagai fakta menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami Penyandang Disabilitas diantaranya: penolakan anak Penyandang Disabilitas untuk masuk sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat di akses bagi peserta Penyandang Disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses Penyandang Disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan Pemerintah dalam partisipasi olah raga bagi Penyandang Disabilitas, dan stigma terhadap keberadaan Penyandang Disabilitas yang telah menafsirkan disabel identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan, dan hanya akan membebani orang disekitarnya.

Tidak seorangpun menghendaki dirinya mengalami disabilitas, baik disabilitas bawaan dari lahir ataupun disabilitas oleh sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai warga Negara yang mengalami kecacatan merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, diberikan kedudukan, hak dan kesempatan yang sama, sesuai jenis dan ragam disabilitas. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam rangka untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk dukungan dan peranserta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terjadi perubahan paradigma tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas ditempatkan sebagai subjek yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga Negara lainnya. Setiap individu Penyandang Disabilitas mendapatkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat, mendapatkan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti lembaga Negara di lingkungan legislatif dan yudikatif, badan usaha baik milik Negara/Daerah ataupun milik perusahaan swasta, termasuk anggota masyarakat pada umumnya tidak turut andil bertanggung jawab dalam Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dimaksud. Dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan aksesibilitas serta menjamin terselenggaranya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya secara optimal dan tanpa diskriminasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak PenyandangDisabilitas. Atas dasar tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk memberikan dasar dan penguatan bagi seluruh pihak di Daerah, baik Pemerintah Daerah, badan usaha, pelaku usaha, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Tujuan yang hendak dicapai terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini yaitu:

1. mewujudkan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara optimal, penuh dan setara dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
2. meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup PenyandangDisabilitas;
3. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
4. memastikan pelaksanaan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuansesuai bakat dan minat yang dimilikinya; dan
5. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peranserta pelaku usaha, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam pelindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan.

Secara umum materi pokok Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, meliputi asas dan tujuan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, ragam disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, peran serta masyarakat, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan perlunya pembentukan Komisi Disabilitas Daerah yang merupakan lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penyandang disabilitas merupakan manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terlahir dengan harkat dan martabat yang sama dengan manusia lainnya sehingga harus diperlakukan sama sebagaimana perlakuan terhadap manusia lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabiltas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandangnya demi memperkecil atau menghilangkan dampak kedisabilitasan sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR